

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJUDIAN PERTANDINGAN SEPAK
BOLA DI TELEVISI**

(Studi Kasus No. 534 / Pid.B / 2010 PN SURABAYA)

SKRIPSI



Oleh :

Irwan Widi Yanto

NPM. 0771010065

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

SURABAYA

2011

HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJUDIAN PERTANDINGAN
SEPAK BOLA DI TELEVISI**

(Studi Kasus No. 534 / Pid.B / 2010 PN SURABAYA)

Disusun Oleh :

IRWAN WIDI YANTO

NPM. 0771010065

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

HARIYO SULISTIYANTORO, SH., MM

NIP/NPT. 19 620625 199103 1 001

FAUZUL ALIWARMAN, SHi., M. Hum

NIP/NPT. 3 8202 07 0221

**Mengetahui
Dekan**

HARIYO SULISTIYANTORO, SH., MM

NIP/NPT. 19 620625 199103 1 001

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJUDIAN
PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI TELEVISI
(Studi Kasus No. 534 / Pid.B / 2010 PN SURABAYA)

Oleh :

IRWAN WIDI YANTO
NPM. 0771010065

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN" JAWA TIMUR
pada tanggal 12 Mei 2011

Pembimbing Utama

Tim Penguji

1.

HARIYO SULISTIYANTORO, SH., MM
NIP/NPT. 19 620625 199103 1 001

SUTRISNO, SH., M. HUM
NIP/NPT. 19 6010212 198803 1001

Pembimbing Pendamping

2.

FAUZUL ALIWARMAN, SHi., M. Hum
NIP/NPT. 3 8202 07 0221

HARIYO SULISTIYANTORO, SH., MM
NIP/NPT. 19 620625 199103 1 001

3.

SUBANI SH., M.SI
NIP/NPT. 19510504 198303 1 001

Mengetahui
DEKAN

HARIYO SULISTIYANTORO, SH., MM
NIP/NPT. 19 620625 199103 1 001

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJUDIAN
PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI TELEVISI
(Studi Kasus No. 534 / Pid.B / 2010 PN SURABAYA)**

Oleh :

IRWAN WIDI YANTO
NPM. 0771010065

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “VETERAN” JAWA TIMUR
pada tanggal 18 Mei 2011

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. **SUTRISNO, SH., MHUM** : (.....)
NIP/NPT. 19601212 198803 1 001
2. **HARIYO SULISTIYANTORO, SH., MM** : (.....)
NIP/NPT. 19 620625 199103 1 001
3. **SUBANI, SH, MSi** : (.....)
NIP/NPT. 19510504 198303 1 001

Mengetahui
DEKAN

HARIYO SULISTIYANTORO, SH., MM
NIP/NPT. 19 620625 199103 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Irwan Widi Yanto
Tempat/Tgl Lahir : Surabaya, 13, Mei, 1984
NPM : 0771010065
Kosentrasi : Pidana
Alamat : Rungkut Harapan L-11, Surabaya

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJUDIAN PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI TELEVISI (Studi Kasus No. 534 / Pid.B / 2010 PN SURABAYA)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya ciptaan saya sendiri, apa yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku bukan hasil jiplakan (*plagiat*).

Apabila di kemudian hari skripsi ini Hasil jiplakan (*plagiat*) maka, saya bersedia di tuntutan di depan pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya , Mei 2011

Mengetahui

KAPROGDI

PENULIS

Subani, SH., MSi
NIP/NPT. 19510504 198303 1 001

Irwan Widi Yanto
NPM. 0771010065

KATA PENGANTAR

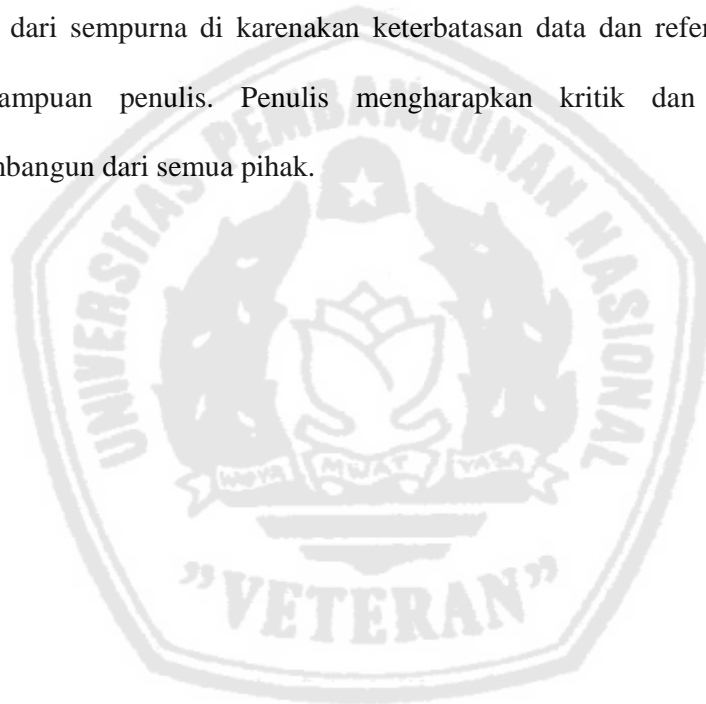
Puji syukur yang sedalam-dalamnya penyusun panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS PERJUDIAN PERTANDINGAN SEPAK BOLA DI TELEVISI” (Studi Kasus No. 534 / Pid.B / 2010 PN SURABAYA).**

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk melengkapi salah satu syarat guna menyelesaikan sarjana hukum program studi Strata I Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan bimbingan serta saran yang sangat berharga kepada :

1. Bapak Hariyo Sulistyantoro, S.H., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, serta selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam pembuatan laporan proposal skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
2. Bapak Sutrisno, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur .
3. Bapak Drs., Ec., Gendut Sukarno, Ms., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur .

4. Bapak Subani, S.H., M.Si., selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Bapak Fauzul Aliwarman SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis dalam pembuatan laporan proposal skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
7. Keluargaku tercinta, yaitu Mama Papaku dan Pakde Budeku yang telah memberikan doa restu semangat, perhatian, cinta dan kasih sayang serta dukungan moril maupun materiil selama ini.
8. *My lovely* Dwi Rahmawati yang selama ini telah mendampingi penulis dalam pembuatan skripsi ini, meskipun sering membuat gaduh, tapi dengan kegaduhan itu penulis dapat terhibur dan dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.
9. Bapak Fahrudin yang telah membantu penulis dalam memberikan tuntunan di dalam menjalani kehidupan ini.
10. Seluruh Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, terutama *my best friend* Aditya, Elia, Isna, Rina, Stela si ambon manise yang telah membantu dan memberikan saran sebagai masukan di dalam pembuatan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kesalahan-kesalahan, untuk itu segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun sangat penulis perlukan demi kesempurnaan penulisan proposal skripsi ini. Meskipun dalam penyusunan proposal skripsi ini penulis telah mencurahkan semua kemampuan, namun penulis menyadari bahwa hasil dari proposal skripsi ini jauh dari sempurna di karenakan keterbatasan data dan referensi maupun kemampuan penulis. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak.



Surabaya, Mei 2011

Penulis

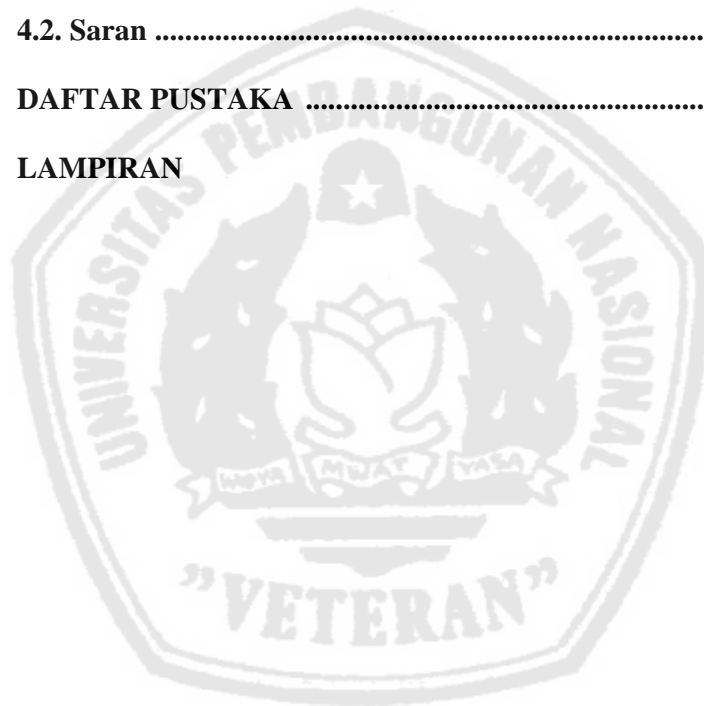
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN UJIAN	
SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI	
SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAKSI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	10
1.5. Kajian Pustaka	11
1.5.1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perjudian Terselubung	
Pertandingan Sepak Bola	11

A. Pengertian Tindak Pidana	11
B. Macam-macam Tindak Pidana	11
1. Tindak Pidana Umum	11
2. Tindak Pidana Khusus	12
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana	13
D. Jenis sanksi Pemidanaan	13
E. Tujuan Pemidanaan	14
F. Jenis-Jenis Alat Bukti	15
G. Fungsi Alat Bukti	15
H. Pengertian Perjudian	16
I. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian	17
J. Macam-Macam Perjudian	18
K. Asas-Asas Hukum Pidana	21
L. Asas-Asas Hukum Acara Pidana	22
M. Pertanggung Jawaban Pidana	23
N. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana	25
1.6. Metode Penelitian	25
1.6.1. Jenis Penelitian	26
1.6.2. Sumber Data	27
a. Bahan Hukum Primer	28
b. Bahan Hukum Sekunder	28
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data	28

A. Penelitian Lapangan	28
B. Studi Kepustakaan	29
1.7. Sistematika Penulisan	30
BAB II IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA	
PERJUDIAN SEPAK BOLA DI TELEVISI	32
2.1. Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana	33
A. Implementasi Penegakan Hukum Oleh Masyarakat	33
B. Implementasi Penegakan Hukum Oleh Kepolisian	33
C. Implementasi Penegakan Hukum Oleh Jaksa	34
D. Implementasi Penegakan Hukum Oleh Hakim	36
a). Pertimbangan Yang Bersifat Yuridis	37
b). Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis	41
E. Implementasi Penegakan Hukum Oleh Pemerintah	43
2.2. Analisa	44
BAB III FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN MARAKNYA	
PERJUDIAN DI DALAM TONTONAN SEPAK BOLA YANG	
ADA DI TELEVISI.....	48
3.1. Faktor Ekonomi	49
3.2. Faktor Sosial	50
A. Pendidikan Yang Rendah	50
B. Situasional	51
C. Presepsi Tentang Probabilitas Kemenangan/Ramalan	
Tentang Kemenangan	51

D. Faktor Belajar	52
E.. Media Masa	52
F. Faktor Lingkungan	53
3.3. Faktor Budaya	53
BAB IV PENUTUP	55
4.1. Kesimpulan	55
4.2. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

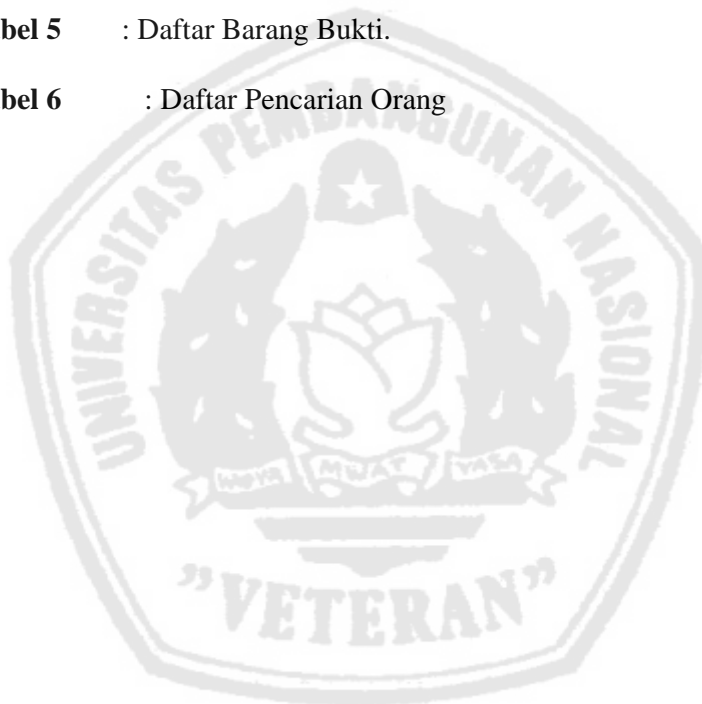
Daftar Gambar 1 : Berkas Perkara

Daftar Gambar 2 : Identitas Tersangka.



DAFTAR TABEL

- Daftar Tabel 1** : Daftar Penahanan.
- Daftar Tabel 2** : Daftar Isi Berkas Perkara.
- Daftar Tabel 3** : Daftar Saksi.
- Daftar Tabel 4** : Daftar Tersangka.
- Daftar Tabel 5** : Daftar Barang Bukti.
- Daftar Tabel 6** : Daftar Pencarian Orang



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** : Surat keterangan telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Surabaya.
- Lampiran 2** : Penetapan Penunjukan Hakim Perkara
- Lampiran 3** : Surat Tuntutan.
- Lampiran 4** : Surat Dakwaan.
- Lampiran 5** : Ikhtisar Putusan
- Lampiran 6** : Laporan Polisi
- Lampiran 7** : Resume
- Lampiran 8** : Surat Perintah Penyidikan
- Lampiran 9** : Berita Acara Pemeriksaan Saksi
- Lampiran 10** : Berita Acara Pengambilan Sumpah
- Lampiran 11** : Berita Acara Pemeriksaan Tersangka
- Lampiran 12** : Pemberitahuan Hak Tersangka Dan Penunjukan Penasehat Hukum
- Lampiran 13** : Berita Acara Penolakan Untuk Didampingi Penasehat Hukum

- Lampiran 14** : Surat Perintah Tugas
- Lampiran 15** : Surat Perintah Penangkapan
- Lampiran 16** : Berita Acara Penangkapan
- Lampiran 17** : Surat Perintah Penahanan
- Lampiran 18** : Berita Acara Penahanan
- Lampiran 19** : Surat Perintah Penggeledahan
- Lampiran 20** : Berita Acara Penggeledahan
- Lampiran 21** : Surat Perintah Penyitaan
- Lampiran 22** : Berita Acara Penyitaan
- Lampiran 23** : Tanda Terima Surat Pelimpahan Perkara Acara
Pemeriksaan Biasa
- Lampiran 24** : Surat Pernyataan

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR
FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Irwan Widi Yanto
NIM : 0771010065
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 13 Mei 1984
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJUDIAN PERTANDINGAN
SEPAK BOLA DI TELEVISI**

ABSTRAKSI

Perjudian khususnya judi bola adalah merupakan suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang ada yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, yang biasa disebut norma, yaitu; kesusilaan, kesopanan dan agama. Karena pada prinsipnya semua agama mutlak menolak dan melarangnya, dan pada hakekatnya perjudian sangat bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara. Permasalahan yang di hadapi adalah Bagaimana implementasi penegakan hukum tindak pidana perjudian terselubung sepak bola di televisi dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan maraknya perjudian di dalam tontonan sepak bola yang ada di televisi khususnya pada masyarakat Surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder saja dan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan dan wawancara oleh pihak yang dianggap mengerti tentang perkara tindak pidana judi bola tersebut. Dalam hal implementasi penegakan hukum dalam kasus perjudian khususnya judi bola harus berasal dan bermula dari masyarakat dengan adanya pelaporan tentang suatu tindak pidana yang terjadi, dan para aparat penegak hukum yaitu kepolisian yang bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana yang terjadi di masyarakat, jaksa/penuntut umum yang bertugas membuat dakwaan dan tuntutan yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, hakim dengan kewenangannya dalam memutus suatu perkara yang tidak boleh memihak, dan hakim harus mempertimbangkan banyak hal terlebih dahulu sebelum membuat keputusan yang sifatnya final, Pemerintah yang membuat suatu peraturan tentang perundang-undangan yang sifatnya memaksa agar dilaksanakan. Bila antara masyarakat, aparat penegak hukum, dan pemerintah bisa melaksanakan fungsinya masing-masing dengan benar, maka implementasi penegakan hukum perjudian, bisa ditegakkan. Faktor-faktor yang menyebabkan maraknya perjudian bola yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, Faktor budaya.

Kata Kunci : Tinjauan yuridis, perjudian, sepak bola

xvii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman di Indonesia membawa pengaruh terhadap perkembangan dalam kehidupan masyarakat. Dalam dasawarsa terakhir ini segi struktur sosial kita mengalami perubahan yang besar. Perubahan tersebut membawa dampak, yaitu munculnya problema-problema terutama dalam lingkungan-lingkungan tertentu pada masyarakat kita. Perubahan kehidupan masyarakat akan memberikan pengaruh dalam perkembangan hukum dalam masyarakat tersebut. Antara perkembangan yang ada di masyarakat dengan perkembangan hukum itu hubungannya seiring. Pada masyarakat yang sederhana, hukumnya menjadi sederhana. Sedangkan pada masyarakat yang kompleks, maka hukumnya akan semakin kompleks. Pada masyarakat yang sederhana, hukum hanya cukup berupa prinsip-prinsip saja (*principle law*) sehingga tidak perlu di buat secara tertulis. Pada perkembangan selanjutnya pergaulan masyarakat akan bertambah kompleks dan menjadi tidak sederhana lagi sehingga diperlukan aturan-aturan lagi yang lebih tegas dan jelas yang dibuat secara tertulis, diarsipkan juga dan di maklumkan agar diketahui dengan pasti.

Persoalan perjudian dari dulu sampai sekarang banyak menimbulkan pertentangan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Seiring dengan kemajuan-kemajuan masyarakat dewasa

ini, baik kemajuan di bidang teknologi ataupun bidang lainnya, Kemajuan-kemajuan tersebut membuat orang semakin pandai dalam melakukan suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana perjudian.

Perjudian adalah suatu tindak pidana yaitu pertarungan sejumlah uang dimana yang menang mendapat uang taruhan itu atau dengan kata lain adu nasib dan setiap bentuk permainan yang bersifat untung-untungan bagi yang turut main, dan juga meliputi segala macam pertarungan yang bertaruh tidak ikut dalam perlombaan tersebut, termasuk juga segala macam pertarungan lainnya. Dimana tindak pidana perjudian ini dijumpai di berbagai lingkungan masyarakat. Hekekatnya perjudian sangat bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara dan ditinjau dari kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak perjudian adalah merupakan problem sosial yang sulit di tanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.

Hal ini sangat terlihat jelas dengan semakin pandainya orang mempergunakan sarana-sarana yang ada dan terbilang *modern* semisal perjudian sepak bola yang ada di televisi. Permainan judi sepak bola yang ada di televisi ini merupakan salah satu tontonan yang akhir-akhir ini sangat populer di Surabaya. Disini para pemain judi sepak bola biasanya melihat pertandingan *club* apa saja yang sedang berlangsung.

Metode berjudi dalam permainan pertandingan bola yang ada di televisi antara lain adalah sebagai berikut :

1. Para pemain membuat perjanjian antara pemain satu dengan pemain lainnya dengan memilih salah satu *team* yang diunggulkan menang dalam pertandingan tersebut. Jika pilihan betul maka ia berhak mendapatkan uang dari penjago *team* yang kalah.
2. Melalui bandar atau pengepul permainan judi bola tersebut.¹

Hasil pengamatan dan pengalaman penulis sehari-hari, sering dijumpai berbagai kejahatan yang timbul sebagai akibat kelanjutan dari kekalahan seseorang bermain judi, khususnya dalam permainan judi bola yang ada di televisi. Hal ini dapat mengakibatkan bertambahnya jumlah kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat, khususnya masyarakat Surabaya. Orang yang sudah kecanduan berjudi sepak bola yang ada di televisi tersebut biasanya sulit untuk menghilangkan kebiasaan tersebut, akhirnya banyak yang melalaikan tugas dan kewajibannya, baik itu sebagai pelajar, pegawai juga kepala rumah tangga. Fery berpendapat bahwa kejahatan tidak hanya disebabkan oleh hal-hal yang terletak dalam diri individu, akan tetapi penyebabnya juga berasal dari luar.² R. Owen berpendapat lain, bahwa lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan seseorang menjadi jahat, dan lingkungan yang baik sebaliknya.³

¹ Hasil wawancara dengan Mr X, pengepul judi bola, hari Sabtu, Tanggal 8 Januari 2011.

² Soesilo, *Kriminologi*, Politea, Bogor 1985, Cet 1, hal 28.

³ W.A. Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, Ghalia, Jakarta 198, Hal 60.

Judi merupakan penyakit masyarakat dan mempunyai gejala-gejala sebagai berikut :

- a. Banyak waktu terbuang sia-sia.
- b. Kemiskinan, kesengsaraan terhadap diri dan keluarga
- c. Bersikap tidak jujur dan selalu berhutang.
- d. Kepentingan kerja selalu diabaikan.
- e. Tidak menghiraukan kesehatan, makan dan minum tidak teratur.
- f. Bersikap tamak dan menggunakan apa saja untuk kepentingannya.
- g. Selalu mengalami kerugian karena tidak dapat apa-apa dengan berjudi.
- h. Sanggup melakukan apa saja asalkan dapat berjudi.
- i. Kemungkinan besar pemain judi akan ditangkap dan didakwa di pengadilan
- j. Pemain judi tidak menjadi kaya melalui perjudian.⁴

Untuk menghindari pengaruh-pengaruh negatif itu, maka pemerintah memandang perlu untuk mengambil tindakan-tindakan, baik itu tindakan Preventif atau tindakan penegakan hukum dan tindakan Respresif atau tindakan pengawasan bagi setiap pelanggar perjudian pada ruang lingkup yang sekecil-kecilnya, sekaligus memberikan terapi dan pengobatan bagi para pelanggar pelaku perjudian sepak bola tersebut dengan memperberat ancaman hukumannya yang tercantum pada Pasal 303 ayat 1e

⁴ www.sepedauntuksekolah.cc/cc/2011/01/sosiologi.html, di akses tanggal 1 april 2011, pukul 16.00 wib.

sampai dengan ayat 3e. Dengan demikian pemerintah berusaha membatasi ruang lingkup perjudian pada ruang lingkup yang sekecil-kecilnya.

Kasus judi ataupun perjudian dari hari ke hari semakin marak. Masalah judi ataupun perjudian merupakan masalah klasik yang menjadi kebiasaan yang salah bagi umat manusia. Sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu pengetahuan, teknologi dan globalisasi maka tingkat dan modus kriminalitas juga mengalami perubahan baik kualitas maupun kuantitasnya. Pada hakekatnya judi maupun perjudian jelas-jelas bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Kemudahan masyarakat untuk memperoleh informasi dari dunia luar dengan memanfaatkan kemajuan fasilitas teknologi informasi dan sebagai dampak langsung globalisasi dalam era reformasi maka pengaruh buruk terhadap sesuatu hal secara langsung akan dirasakan oleh masyarakat, apalagi bagi masyarakat yang taraf pendidikan dan ekonominya menengah ke bawah. Sebagai dampaknya jalan pintas untuk memperoleh sesuatu bukan hal yang diharapkan lagi, termasuk judi dan perjudian.

Sangat sulit untuk mampu memisahkan perilaku judi dari masyarakat kita. Terlebih orang Indonesia atau orang Jawa khususnya judi telah benar-benar mendarah daging. Bagi mereka yang terlibat langsung dengan perjudian akan cenderung berpikir negatif dan tidak rasional. Bahkan tidak mungkin akan memicu pada tindak kriminal yang lebih besar. Dari segi perilaku masyarakat juga mudah ditebak, mereka ini cenderung

mengisolasi diri dan mencari komunitas yang sejalan dengan mereka. Dengan demikian mungkin judi sudah merupakan penyakit sosial yang usianya sebaya dengan kelahiran manusia dan tetap saja ada mengisi kebutuhan manusia.

Selanjutnya bagaimana masyarakat menilai, atau memandang terhadap judi, yang jelas dalam kehidupan bermasyarakat secara nyata memandang dan menilai suatu perbuatan terutama masalah judi, terdapat dua macam pandangan atau penilaian, yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan dan masing-masing pandangan sulit sekali ditemukan. Ada sebagian masyarakat yang menerima dan senang melakukan perbuatan judi, dan dilain pihak terdapat juga yang tidak senang dan menolaknya bahkan sampai menjauhi dan menganggap judi sebagai perbuatan yang terkutuk. Masyarakat yang demikian ini menghendaki kehidupan yang baik dan yang bersih dari segala perbuatan yang dipandang kurang baik atau tidak patut dilakukan. Dengan demikian, menurut pendapat masyarakat tentang perjudian di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Golongan pertama, yaitu masyarakat yang senang atau menerima judi khususnya judi bola.
2. Golongan kedua, yaitu masyarakat yang tidak senang atau menolak judi atau perjudian.⁵

⁵ <http://ceritaleosi.blogspot.com/2009/07/13-terdakwa-judi-sultan.html>, di akses tanggal 2 April 2011, pukul 20.00 wib.

Golongan pertama yaitu yang senang menerima perjudian khususnya judi bola. Tipe masyarakat ini berpandangan dan biasanya mereka menerima adanya judi bola tanpa menghiraukan akibat-akibat yang ditimbulkan baik pada dirinya maupun pada masyarakat. Karena mereka hanya memandang dan memperhatikan pada segi keuntungannya saja, dan mereka menerima judi sebagai salah satu di antara jalan keluar untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Misalnya ingin kaya secara cepat ingin mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya dengan tenaga dan biaya yang ringan. Golongan pertama ini beranggapan bahwa masalah judi sehari-hari, dapat menghasilkan sebanyak-banyaknya dengan melalui permainan judi bola.

Ada pandangan lain yang berpendapat dan cenderung cara berfikir terhadap judi hanya ditinjau dari segi ekonomi semata-mata, sehingga menganggap judi itu benar dan tepat sekali dan harus diterima,, dengan demikian mereka cenderung untuk menggunakan falsafah menghalalkan segala cara.

Dengan berfikir dari segi ekonomis memang tepat sekali untuk mempercepat masuknya dan atau hasil yang dimaksudkan, dan dapat ditumpuk yang relatif singkat, dengan perjudian uang mengalir gampang sekali. Inilah pandangan atau penilaian bagi golongan yang senang dan menerima kehadiran judi, yang dititik beratkan pada segi keuntungan saja, tanpa menghiraukan akibat negatifnya.

Golongan kedua yaitu yang tidak senang atau menolak terhadap judi. Golongan ini bertitik tolak pada kebiasaan-kebiasaan hidup tanpa membawa akibat yang negatif termasuk permainan judi, karena ingin yang baik. Judi adalah merupakan suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang ada yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, yang biasa disebut norma, yaitu; kesusilaan, kesopanan dan agama. Karena pada prinsipnya semua agama mutlak menolak dan melarangnya, sebagaimana telah dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum.

Perjudian khususnya judi bola adalah merupakan suatu perbuatan yang dianggap bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang ada yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, yang biasa disebut norma, yaitu; kesusilaan, kesopanan dan agama. Karena pada prinsipnya semua agama mutlak menolak dan melarangnya, sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa pada hakekatnya perjudian adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara.

Semua akibat-akibat yang ditimbulkan karena judi, jika dibandingkan dengan hasil yang dicapai, tidak ada manfaatnya lagi, atau dengan kata lain merehabilitasi masyarakat yang disebabkan oleh pengaruh atau akibat-akibat negatif dari perjudian, biaya yang lebih besar/berat dari pada dana(hasil yang diperoleh). Mereka beranggapan pula bahwa tidak ada orang kaya dari judi.

Pembatasan ruang lingkup guna membatasi ruang lingkup perjudian khususnya judi bola perlu memperhatikan adanya aspek-aspek hukum lainnya. Semua aspek tersebut perlu mendapat pengamatan sistematis dan terintegrasi yang nantinya akan lebih mencerminkan bagaimana fenomena penegakan hukum di Indonesia.⁶ Inilah yang menjadi entri poin penulis mengambil judul tentang perjudian terselubung di dalam permainan sepak bola yang ada di televisi.

1.2. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dimaksudkan untuk memberi arah penelitian serta untuk memudahkan pembahasan terhadap permasalahan yang penulis ambil sehingga tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang sebenarnya. Maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana implementasi penegakan hukum tindak pidana perjudian sepak bola di televisi ?
- b. Faktor-faktor yang menyebabkan maraknya perjudian di dalam tontonan sepak bola yang ada di televisi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

⁶ Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 3.

- a) Guna untuk mengetahui implementasi penegakan hukum tindak pidana perjudian dalam perkara ini.
- b) Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan maraknya perjudian di dalam tontonan sepak bola yang ada di televisi.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah dan memperdalam pengetahuan penulis di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang menyangkut penerapan penegakan hukum masalah perjudian di dalam pertandingan sepak bola yang ada di televisi.
2. Untuk melatih dan mengembangkan kemampuan penulis di bidang penelitian.
3. Untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan masukan dan pemikiran serta menambah pengetahuan mengenai terjadinya perjudian di dalam pertandingan sepak bola yang ada di televisi.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Perjudian Terselubung Pertandingan Sepak Bola

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah "Peristiwa Pidana" atau "Tindak Pidana" adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda "*strafbaar feit*".

Menurut Van Hamel bahwa "*strafbaar feit*" adalah :

"kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang bersifat melawan hukum , yang patut di pidana (*straf waarding*) dan dilakukan dengan kesalahan".⁷

Beberapa sarjana telah berusaha untuk memberikan perumusan tentang pengertian dari peristiwa pidana, diantaranya :

"Menurut Prof. Simons *Een strafbaargelesetelde, onrechtmatige, met schuld in verband standee handelling van een teorekeningvatbar person.* Terjemahan bebasnya adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab".⁸

B. Macam-Macam Tindak Pidana

1. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana dapat dibagi-bagi dengan menggunakan berbagai kriteria. Pembagian ini berhubungan erat dengan

⁷ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1998, hal 56

⁸ C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal.38.

berat ringannya ancaman, sifat, bentuk dan perumusan suatu ajaran-ajaran umum hukum pidana. Dengan membagi sedemikian itu sering juga dihubungkan dengan akibat-akibat hukum yang penting.⁹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku sekarang diadakan tiga macam pembagian title (bab), yaitu buku I tentang peraturan umum, buku ke II tentang kejahatan, dan yang ditempatkan dalam buku ke-III tentang pelanggaran.¹⁰

2. Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus ini dikategorikan tindak pidana yang sifatnya tidak di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun ada aturan tersendiri yang mengatur di dalam tindak pidana tersebut. Tindak pidana khusus ini meliputi antara lain :

1. Terorisme.
2. Narkotika dan *psykotropika*.
3. Korupsi.
4. Perlindungan Anak.
5. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)
6. Militer.

⁹ S.R. Siantury, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta, Alumni Ahaem-Petehaem, 1986, hal 228.

¹⁰ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1986, Cetakan ke tujuh, hal 282.

7. *Money laundry*.

8. Ham.

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur yang terkandung di dalam tindak pidana di Indonesia menurut Simons antara lain sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia.
- b. Diancam dengan pidana.
- c. Melawan hukum.
- d. Dilakukan dengan kesalahan.
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹¹

Bila menurut pendapat Moeljatno dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan.
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum).
- c. Ancaman Pidana (bagi yang melanggar).¹²

D. Jenis Sanksi Pidana

Jenis-jenis sanksi pidana terdapat dalam Bab II Buku I Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari hukuman/Pidana pokok, dan hukuman/Pidana Tambahan.

Hukuman/pidana pokok terdiri dari :

1. Hukuman mati (*death penalty/capital punishment*)

¹¹ <http://hukumhindu.vedasastra.com/2011/02/tindak-pidana>. Diakses hari selasa tanggal 25 Januari 2011 pukul 18.00 wib.

¹² Chawasi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 79.

2. Hukuman penjara
3. Hukuman kurungan
4. Hukuman denda
5. Hukuman tutupan

Sedangkan hukuman/pidana tambahan terdiri dari :

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

E. Tujuan Pemidanaan

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, bisa dibedakan antara prevensi special dan prevensi general atau sering juga digunakan istilah “*spesial deterrence*” dan “*general deterrence*”. Dengan prevensi spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk melakukan tindak pidana lagi.

Hal ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Teori tujuan pidana serupa ini dikenal dengan sebutan *Reformation* atau *Rehabilitation Teory*. Dengan prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah

laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana. (Muladi dan Nawawi. 18: 1998)

F. Jenis-Jenis Alat Bukti

Permasalahan alat bukti kerap membawa kesulitan baik lembaga Kepolisian selaku penyidik, lembaga Kejaksaan selaku penuntut maupun lembaga Peradilan dalam memeriksa dan memutus perkara. Alat bukti yang ada sekarang dirasa sangat terbatas mengingat perubahan yang cukup pesat dalam masyarakat. Selain itu, dalam lapangan hukum pidana penafsiran, baik tentang duduk perkara maupun tentang alat bukti hanya terbatas pada penafsiran ekstensif, yaitu memberikan tafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam peraturan itu.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur tentang jenis-jenis alat-alat bukti yang diatur pada pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

G. Fungsi Alat Bukti

Alat bukti yang sudah diuraikan diatas dapatlah dikatakan berfungsi untuk menjadikan terang tindak pidana yang didakwakan

dan menambah keyakinan hakim bahwa terdakwa benar-benar yang bersalah serta sebagai pelaku, juga dapat untuk mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang akan dijatuhkan terhadapnya. Hal tersebut sebagai perwujudan dari pasal 183 KUHP yang mana tidak akan dapat dijatuhi pidana kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti, sesuai dengan alat bukti maka dapat menjawab semua sangkalan yang dikemukakan oleh terdakwa dan jika berusaha mengelak.

Hakim dalam menjatuhkan putusan akan menilai semua alat bukti yang sah untuk menyusun keyakinan hakim dengan mengemukakan unsur-unsurnya kejahatan yang didakwanya menurut hukum pidana atau tidak, serta pidana apa yang setimpal dengan perbuatannya.¹³

H. Pengertian Perjudian

Judi atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”¹⁴.

Perjudian diartikan sebagai perbuatan dengan berjudi. Berjudi sendiri diartikan sebagai mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan

¹³ Wawancara yang dilakukan oleh penulis tanggal 12 Maret 2011 terhadap Bapak M. Sholeh SH. MH

¹⁴ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hal .419.

sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.¹⁵

Pengertian lain dari judi atau perjudian dalam bahasa Belanda dapat dilihat pada kamus Istilah hukum *Fockema Andreae* yang menyebutkan sebagai “*Hazardspel* atau kata lain dari *Kansspel*, yaitu permainan judi, permainan untung-untungan yang dapat dihukum berdasarkan peraturan yang ada”.¹⁶

I. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Tindak pidana perjudian mempunyai beberapa unsur-unsur sebagai berikut :

1. Ada permainan atau perbuatan manusia
2. Bersifat untung-untungan atau tidak
3. Dengan menggunakan uang atau barang sebagai taruhannya¹⁷

Dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Menggunakan kesempatan untuk main judi.
- b. Dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP.

Seperti yang dimaksud dalam Pasal 303 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut :

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal 367.

¹⁶ Mr. N.E. algra dan Mr. RR.W. Gokkel, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, diterjemahkan oleh Saleh Adwinata dkk, Bina Cipta, Jakarta, 1983, hal. 186.

¹⁷ www.sepedauntuksekolah.cc/cc/2011/01/sosiologi.html, di akses tanggal 1 april 2011, pukul 21.00 wib.

“Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang yang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain yang juga terhitung masuk main judi ialah pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain”.¹⁸

J. Macam-Macam Perjudian

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu:

1. Perjudian di Kasino, antara lain terdiri dari :

- a. Roulette;
- b. Blackjack;
- c. Bacarat;
- d. Creps;
- e. Keno;
- f. Tombala;
- g. Super Ping-Pong;
- h. Lotto Fair;
- i. Satan;
- j. Paykyu;
- k. Slot Machine (Jackpot);
- l. Ji Si Kie;

¹⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor 1995, hal. 222.

- m. Big Six Wheel;
 - n. Chuc a Cluck;
 - o. Lempar paser/bulu ayam pada sasaran atau papan;
 - p. Yang berputar (Paseran);
 - q. Pachinko;
 - r. Poker;
 - s. Twenty One;
 - t. Hwa-Hwe;
 - u. Kiu-Kiu
2. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan:
- a. Lempar paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak;
 - b. Lempar gelang;
 - c. Lempar uang (coin);
 - d. Koin;
 - e. Pancingan;
 - f. Menebak sasaran yang tidak berputar;
 - g. Lempar bola;
 - h. Adu ayam;
 - i. Adu kerbau;
 - j. Adu kambing atau domba;
 - k. Pacu kuda;

- l. Kerapan sapi;
 - m. Pacu anjing;
 - n. Hailai;
 - o. Mayong/Macak;
 - p. Erek-erek.
3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan:
- a. Adu ayam;
 - b. Adu sapi;
 - c. Adu kerbau;
 - d. Pacu kuda;
 - e. Karapan sapi;
 - f. Adu domba atau kambing;
 - g. Adu burung merpati;

Dalam penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian.

Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk katagori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303

ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi :

“Yang dikatakan main judi yaitu permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaaran atau kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk permainan judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain”.

K. Asas-Asas Hukum Pidana

Asas-asas hukum pidana terdiri dari beberapa asas yaitu sebagai berikut :

1. Penafsiran peraturan-peraturan pidana itu hanya berdasarkan arti kata-kata, yang terdapat di dalam aturan pidana itu saja.
2. Tidak ada hukuman jika tidak ada kesalahan.
3. Hukuman pidana menjatuhkan sanksinya, yaitu hukuman jika di langgar.
4. Yang dapat di hukum hanya orang biasa saja, sedangkan badan hukum dan binatang tidak.
5. *Asas Teritoroaliteit* yaitu orang baik orang Indonesia, maupun orang asing yang telah melakukan kejahatan di dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, di adili oleh hakim Indonesia, di dalam asas ini orang menitik beratkan pada dimana tindak pidana itu telah dilakukan.

6. *Asas Personaliteit* aktif yaitu setiap orang Indonesia, baik ia ada di Indonesia, ataupun di luar Indonesia, di kenakan hukum pidana Indonesia, di mana saja ia melakukan kejahatan.
7. *Asas Personaliteit* pasif yaitu hukum pidana itu berlaku di mana saja dan terhadap siapa saja, jika kepentingan-kepentingan nasional tertentu di langgar atau di nodai.
8. *Asas Universaliteit* yaitu tiap-tiap Negara dengan hukum pidananya berkewajiban untuk menjaga dan memelihara jangan sampai ketertiban di seluruh dunia itu dilanggar.¹⁹

L. Asas-Asas Hukum Acara Pidana

Terdapat asas yang terkandung dalam Hukum Acara Pidana, asas-asas tersebut yang terkandung di dalam Hukum Acara Pidana yaitu :

1. Asas Legalitas.
2. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan
3. Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum.
4. Asas Praduga Tidak Bersalah.
5. *Asas Oportunitas*.
6. Pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum.
7. Semua orang diberlakukan sama di depan Hakim.
8. Asas peradilan dilakukan oleh hakim karena jabatannya.
9. *Asas Accusatoir dan Inquisitoir*.

¹⁹ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan kesepuluh, PT Raja Grafindo Persada Grafika, Bandung 2005, hal 179.

10. Pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan.²⁰

M. Pertanggung Jawaban Pidana

Berbicara mengenai pertanggung jawaban pidana maka akan selalu mengaitkannya dengan adanya kesalahan yang melanggar larangan pidana dan kemampuan bertanggungjawab, tanggungjawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (apabila terjadi apa-apa, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada “ apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan“, yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana : “ tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld ; actus non facit reum nisi mens sit rea*)”. Asas ini memang tidak diatur dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia.

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.²¹ Untuk lebih memahami tentang

²⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafiaka, Jakarta 2006, hal 10.

²¹ Loc. Cit. S.R. Siantury, hal 250.

pertanggungjawaban dalam hukum pidana maka kita harus mengetahui apa sebenarnya arti kesalahan itu :

“orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana , dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu mengetahui makna (jelek) perbuatan tersebut, dengan kata lain perbuatan tersebut memang sengaja dilakukan.”²²

Penjelasan arti kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang yang normal dan sehat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggungjawab, hanya dijelaskan mengenai kemampuan bertanggung jawab yaitu dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) :

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit, tidak dapat di pidana.”

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan definisi ketidakmampuan bertanggung jawab ditandai oleh salah satu dari dua hal yaitu jika cacat atau jiwa yang terganggu karena penyakit. Tidak mampu bertanggungjawab adalah tidaknormalan keadaan batin pembuat karena cacat jiwa atau gangguan penyakit jiwa, sehingga padanya tidak memenuhi persyaratan untuk diperiksa. Dengan kata lain seseorang dipandang bertanggungjawab jika tidak ditemukan keadaan-keadaan tertentu. Maka dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan

²² Ibid, hal 155

bahwa pengertian pertanggung jawaban pidana yaitu kemampuan seseorang untuk menerima resiko dari perbuatan yang diperbuatnya sesuai dengan undang-undang.

N. Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana

Dalam memutus suatu perkara pidana hakim berpegang pada hati nuraninya dan juga bukti-bukti yang ada serta keterangan saksi maupun terdakwa menyatakan perbuatan terdakwa,²³ dalam hal ini hakim dituntut untuk bisa membedakan pembedaan antara otak pelaku, pelaku, dan kurir pelaku tindak pidana.

1.6. Metode Penelitian

Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi. Metode disini diartikan sebagai suatu cara atau teknis dalam suatu proses penelitian. Sementara itu penelitian itu terjemahan dari bahasa inggris yang di ambil dari kata *research* berasal dari kata *re* (kembali) dan *search* (mencari). Research berarti mencari kembali, oleh karena itu penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”. Apabila suatu penelitian merupakan usaha pencarian, maka timbul pertanyaan apakah yang di cari itu. Pada

²³ Hasil wawancara dengan hakim M. Sholeh SH. MH, tanggal 12 Maret 2011.

dasarnya yang di cari itu adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar.²⁴

Pengertian dan metode di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan metode penelitian adalah suatu cara atau jalan untuk memecahkan masalah yang ada guna menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan tentang cara mengumpulkan menyusun, serta menginterpretasikan data yang sesuai dengan pedoman atau aturan yang berlaku suatu karya ilmiah.

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris yaitu penelitian hukum mengenai perilaku- perilaku (atau aksi-aksi dan interaksi) manusia secara actual telah dan/ atau yang secara potensial akan terpola. Karena setiap perilaku atau aksi itu merupakan suatu realita sosial yang tersimak dalam pengalaman indrawi yang empiris, setiap penelitian yang mengonsepsikan hukum sebagai perilaku dan aksi yang dapat disebut dengan penelitian sosial.²⁵

Penelitian hukum Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder

²⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 2000, Hal 1

²⁵ M. Syamsudin, *Operasinalisasi Penelitian Hukum*, P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 30

saja.²⁶ Penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat. *Empirical law research*, yaitu penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku anggota masyarakat dalam hubungan hidup bermasyarakat. Penelitian hukum empiris memperoleh data dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari Pengadilan Negeri sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik melalui pengamatan dan wawancara. Penelitian hukum sebagai penelitian sosiologis (empiris) dapat direalisasikan kepada penelitian terhadap efektivitas hukum yang berlaku ataupun penelitian terhadap identifikasi hukum.

1.6.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan penelitian.²⁷

Data sekunder terbagi lagi menjadi :

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2011, hal 13.

²⁷ Loc.cit. M. Syamsudin, hal. 98

a). Bahan Hukum Primer²⁸

Bahan hukum primer yang dimaksud adalah Peraturan perundang-undangan RI.

b). Bahan Hukum Sekunder²⁹

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Bahan-bahan sekunder yang dipergunakan didalam penulisan skripsi ini.

Data Primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung objeknya misalnya dengan cara wawancara, observasi, pengamatan dan angket.³⁰

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

A. Penelitian lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan di tempat obyek yang akan penulis teliti.³¹

(1) Observasi atau pengamatan

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan

²⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Gahlia Indonesia, Jakarta, 1982. Hal 96

²⁹ Ibid. h. 96

³⁰ Ibid. h. 99

³¹ Indrati Rini, *Handout Metodologi Penelitian Hukum*, 2007

dengan sistematis dengan fenomena-fenomena ataupun masalah-masalah yang diteliti.

(2) *Interview* atau wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang mengadakan tanya jawab langsung dengan narasumber guna melengkapi data baik lisan maupun tulisan atau sejumlah keterangan data yang diperlukan. Guna melengkapi data-data tersebut penulis menentukan narasumber sebagai berikut :

Nara sumber yang dipilih oleh penulis adalah Kapolsek Rungkut Surabaya, Satreskrim Polrestabes, dan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

B. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

1. Studi Kepustakaan

Yaitu dilakukan dengan cara mempelajari, mengumpulkan pendapat para pakar hukum yang dapat dibaca dari literatur, yurisprudensi, majalah-majalah dan koran-koran yang kebetulan memuat tentang masalah yang diteliti.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data merupakan hal yang terpenting agar data yang sudah terkumpul dengan cara yang dapat dipertanggung jawabkan dapat menghasilkan jawaban dari permasalahan. Data-data yang terkumpul akan disusun secara deskriptif kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara

memaparkan data-data yang diperoleh dari lapangan baik data primer maupun data sekunder.

Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kebenaran yaitu dengan menguraikan data yang sudah terkumpul sehingga dengan demikian dapat dilakukan pemecahan masalah. Analisis yang penulis gunakan adalah analisis interaktif, yaitu model analisis yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dilakukan pula suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut sehingga data-data yang terkumpul akan berhubungan satu dengan yang lainnya secara sistematis.

1.7. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan mengikuti uraian skripsi ini, maka disusun menurut urutan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan. Didalamnya menguraikan tentang latar belakang masalah, kemudian berdasarkan masalah tersebut maka dirumuskan permasalahan. Selanjutnya disajikan tujuan dan manfaat penelitian sebagai harapan yang ingin dicapai melalui penelitian ini. Pada bagian kajian pustaka yang merupakan landasan dari penulisan skripsi. Kemudian diuraikan beberapa konsep definisi yang berkaitan dengan judul penelitian. Selanjutnya diuraikan tentang metode penelitian yang merupakan salah satu syarat dalam setiap penelitian. Intinya mengemukakan tentang tipe penelitian dan

pendekatan masalah, sumber bahan hukum, langkah penelitian, dan bab ini dakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II yaitu mengenai pembahasan dan analisa tentang implementasi penegakan hukum dalam perkara perjudian pertandingan sepak bola di televisi. Dalam Bab II ini terdapat dua sub bab yang terdiri dari duduk perkara dan analisa penulis terhadap implementasi penegakan hukum dalam perkara perjudian terselubung pertandingan sepak bola di televisi.

Bab III, yaitu mengenai pembahasan tentang masalah proses terjadinya perjudian dan faktor-faktor yang menyebabkan maraknya perjudian sepak bola yang ada di televisi.

Bab IV, atau bab penutup dari sistematika penulisan skripsi ini, yakni memuat ringkasan dari seluruh uraian dan pembahasan untuk selanjutnya disampaikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran yang di anggap perlu.